



PH Mantan Sekwan Diputus Tersangka akan Maju Sendiri

Belum Diterima, tapi Sudah Diperiksa KPK dan Kejaksaan

NEGARA - Nelayan Desa Pengambengan pertanyakan bantuan kapal yang semestinya sudah diterima pada 2014 lalu. Tapi, sampai saat ini belum ada realisasi. Padahal, dua kelompok nelayan sudah dipastikan dapat bantuan dua kapal dengan nilai masing-masing Rp 1,7 miliar. Buntut tidak diterimanya kapal ini, kelompok nelayan ini didatangi orang yang mengaku dari Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) untuk menanyakan bantuan dua kapal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Selain itu, kelompok nelayan harus berurusan dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali. Beberapa orang dari kelompok nelayan yang menerima bantuan kapal ini dipanggil untuk dimintai keterangan. Padahal sampai saat ini kapal bantuan belum diterima. "Sudah pasti dapat, katanya kapal ada di Banyuwedang, Gerogak," kata Sakirin, nelayan yang memohon bantuan kapal.

Menurutnya, permohonan bantuan kapal nelayan dari Desa Pengambengan itu atas nama kelompok nelayan

Anugerah dan Muara Indah. Permohonan ditujukan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, melalui Provinsi Bali. Dua kelompok ini dipastikan mendapat bantuan dua buah kapal bersamaan dengan bantuan dua buah kapal nelayan Serangan dan nelayan dari Buleleng. Total ada 7 kapal bantuan dengan nilai masing-masing kapal Rp 1,7 miliar.

Sejak dipastikan mendapat bantuan kapal, nelayan berharap kapal segera diberikan. Tetapi hingga saat ini belum ada kapal yang diterima. "Dari dulu kalau ditanya pernah bilang masih kurang jaring, kurang mesin. Masih

kurang inilah itulah," ujarnya.

Kapal tidak datang hingga saat ini, hingga kelompok nelayan ini didatangi tiga orang yang mengaku dari KPK untuk menanyakan masalah kapal yang dimohonkan. Saat didatangi antirasuah itu, dua kelompok nelayan itu disodori kertas dan disuruh untuk tandatangan. Bahkan orang yang mengaku dari KPK itu mengatakan kapal bantuan bisa diambil di Gerogak. "Bilangnya suruh ambil, tapi kami tidak ada uang untuk beli solarnya. Se-

mestinya kapal diantar kesini, tapi kok disuruh ngambil. Sampai sekarang belum lihat seperti apa bentuk kapalnya kalau memang ada," ungkapnya.

Selain itu, Sakirin dan kelompoknya dipanggil Kejati Bali untuk menanyakan masalah kapal yang dimohonkan. Saat itu, Sakirin mengakui memang mengajukan bantuan kapal, tetapi meski disebut sudah pasti dapat bantuan kapal, belum ada kapal yang

diterima kelompoknya.

Sakirin meyakini bantuan kapal yang dimohon ini telah dijadikan bancakan korupsi, karena saat mengajukan proposal bantuan yang diminta adalah kapal kayu. Sedangkan kapal yang kabarnya dibuat di galangan Pacemengan, Banyuwangi, tersebut kapal terbuat dari fiber. Kapal sengaja di gelapkan. Akhirnya, sekarang tidak bertuan," terangnya. (bas/gup)

Edisi : Selasa, Rabu, 26 April 2019

Hal : 28